

## Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia

Rachel Christie<sup>1</sup> Michaela<sup>2</sup> Naisyirah Ramadhani Tuasikal<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Rachel.205230067@stu.untar.ac.id](mailto:Rachel.205230067@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Michaela.205230068@stu.untar.ac.id](mailto:Michaela.205230068@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[Naisyirah.205230314@stu.untar.ac.id](mailto:Naisyirah.205230314@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi hukum melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Pasal 24C UUD 1945, MK dapat melakukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Melalui judicial review, MK memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Uji materi ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya terancam. Ketika suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, MK dapat membatalkannya. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat tetap sejalan dengan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, MK juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap legislatif dan eksekutif. Beberapa keputusan MK yang penting, seperti pembatalan pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, menunjukkan dampak signifikan terhadap tatanan hukum Indonesia. Oleh karena itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas konstitusional tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Uji Materi, Supremasi Hukum

### Abstract

*The Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia plays a central role in upholding the rule of law through the review of laws against the 1945 Constitution (UUD 1945). As an institution granted authority by Article 24C of the UUD 1945, MK can conduct judicial review of laws deemed contradictory to the constitution. Through this process, MK ensures that legislative products produced by the People's Representative Council (DPR) and the President do not violate the fundamental principles of the UUD 1945. The judicial review can be filed by individuals, groups, or state institutions whose constitutional rights are threatened. When a law is declared unconstitutional, MK has the power to annul it. This process ensures that laws align with human rights, democratic principles, and popular sovereignty. Furthermore, MK also acts as a balance of power by overseeing both the legislative and executive branches. Several important decisions by MK, such as the annulment of articles in the Labor Law, demonstrate significant impacts on Indonesia's legal framework. Therefore, MK not only functions as a constitutional overseer but also as a balancing force within Indonesia's state structure.*

**Keywords:** Constitutional Court, Judicial Review, Rule of Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga supremasi hukum dan kedaulatan negara. Sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK berfungsi sebagai penjaga utama dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merupakan dasar hukum yang tertinggi, yang mengatur seluruh

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap produk hukum, termasuk undang-undang yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, harus selalu sesuai dengan UUD 1945. MK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua kebijakan negara tetap sejalan dengan konstitusi yang mengatur hak-hak dasar rakyat, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Peran MK dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia sangat penting karena MK memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sangat relevan dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratis, di mana peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif harus tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Fungsi uji materi ini memberi peluang bagi warga negara atau lembaga negara lainnya untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang mereka anggap tidak sejalan dengan hak konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan dalam menjaga konsistensi hukum, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional individu atau kelompok masyarakat dari kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Secara historis, MK dibentuk untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembentukan MK ini, yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, menandai komitmen negara untuk memperkuat sistem demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai lembaga yang independen, MK bertugas untuk menjaga agar negara tidak keluar dari koridor konstitusi, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam penerapannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, MK semakin menunjukkan eksistensinya dalam memberikan keputusan-keputusan yang berpengaruh besar terhadap tatanan hukum dan kebijakan negara.

Salah satu aspek penting dalam menjaga supremasi hukum adalah keberadaan lembaga yang dapat menguji kebijakan hukum negara, termasuk undang-undang, apakah sesuai dengan konstitusi. MK, sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan fungsi judicial review, telah memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang diterbitkan oleh DPR dan Presiden tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Dalam hal ini, MK bertindak sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan legislatif dan eksekutif, yang dapat mengeluarkan kebijakan atau undang-undang yang mengabaikan hak-hak rakyat atau prinsip demokrasi. Fungsi ini menjadi lebih relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, di mana semua kebijakan publik harus berdasarkan pada konstitusi yang disepakati bersama oleh seluruh elemen negara. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, MK dapat melakukan uji materi terhadap produk hukum yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Uji materi ini bukan hanya dilakukan atas dasar pengajuan individu atau kelompok yang merasa hak-haknya terancam, tetapi juga bisa dilakukan oleh lembaga negara atau bahkan atas inisiatif MK sendiri. Mekanisme uji materi ini menjadikan MK sebagai lembaga yang sangat berperan dalam menjamin bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, serta bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau DPR tetap memperhatikan hak-hak dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MK melalui uji materi dapat mengubah kebijakan pemerintah atau pembatalan undang-undang yang tidak konstitusional, sehingga memperkuat negara hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.

<sup>2</sup> Salia, E. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Doctrinal*, 1(1), 1-18.

---

Namun, meskipun MK memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, peran MK dalam menjaga kedaulatan negara tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktek, MK menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh MK adalah memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah dan DPR. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang mengikat, MK sering kali menghadapi resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil, terutama ketika keputusan tersebut mengubah atau membatalkan kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya. Pada titik ini, MK harus menunjukkan kemampuannya untuk menjaga kewibawaan dan otoritasnya sebagai lembaga yang independen dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Selain itu, MK juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa proses uji materi dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu. Keputusan-keputusan MK sering kali menyentuh isu-isu sensitif yang melibatkan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, MK harus senantiasa menjaga integritas dan independensinya dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari luar. Dalam hal ini, MK harus menjadi lembaga yang tidak hanya menjaga supremasi hukum, tetapi juga menjadi simbol dari penegakan keadilan dan kedaulatan negara yang benar-benar berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.<sup>3</sup>

Peran MK dalam menjaga supremasi hukum dan kedaulatan negara semakin penting seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Dalam dunia yang semakin global, kebijakan negara harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi. MK tidak hanya menjadi lembaga yang mengawasi jalannya proses legislasi dan pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai pengayom yang melindungi hak-hak konstitusional rakyat dan memastikan bahwa negara tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia, MK harus dapat beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang ada, sehingga dapat terus menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjaga supremasi hukum serta kedaulatan negara Indonesia.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi Berperan Dalam Menjaga Supremasi Hukum Melalui Uji Materi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apa Tantangan Yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Kedaulatan Negara Melalui Putusan-Putusan Yang Bersifat Mengikat Dan Berpengaruh Besar Terhadap Kebijakan Pemerintah?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam metode ini, peneliti berupaya untuk menganalisis dan menafsirkan peraturan hukum

---

<sup>3</sup> Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 312-320.

yang ada untuk memahami isi dan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini tidak terfokus pada kondisi sosial atau fakta hukum yang terjadi di lapangan, melainkan lebih pada kajian terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersifat normatif, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Metode yuridis normatif ini sangat berguna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apakah suatu tindakan atau kebijakan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau bagaimana norma hukum diterapkan dalam situasi tertentu. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif, di mana peneliti akan menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, serta memahami bagaimana norma hukum tersebut berinteraksi satu sama lain. Selain itu, penelitian ini juga dapat dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku teks, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang dapat memberikan penjelasan atau teori terkait penerapan norma hukum. Sebagai metode yang berfokus pada teks hukum, penelitian yuridis normatif memiliki keunggulan dalam hal objektivitas, karena hanya mengandalkan dokumen dan peraturan yang sudah ditetapkan. Namun, kelemahannya adalah kurangnya penekanan terhadap realitas sosial atau implementasi hukum di lapangan, yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan kenyataan yang terjadi dalam praktik. Meskipun demikian, metode ini tetap menjadi pendekatan utama dalam penelitian hukum, terutama ketika tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian hukum yang ada dengan norma yang berlaku secara normatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mahkamah Konstitusi Berperan Dalam Menjaga Supremasi Hukum Melalui Uji Materi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia, salah satunya melalui pelaksanaan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Supremasi hukum merujuk pada keadaan di mana hukum menjadi aturan tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa ada yang lebih tinggi darinya, termasuk kebijakan pemerintah atau undang-undang. Sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK memastikan bahwa setiap produk legislasi yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Dasar hukum dari peran MK ini tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, serta memutuskan pembubaran partai politik dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal ini memberikan dasar yang jelas mengenai kewenangan MK dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait dengan pengujian undang-undang. Secara lebih rinci, MK memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, yaitu pemeriksaan terhadap suatu undang-undang apakah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, MK merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga konstitusionalitas produk hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

Uji materi merupakan mekanisme yang digunakan oleh MK untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Uji materi ini dapat dilakukan atas permohonan dari individu, kelompok masyarakat, lembaga negara, atau bahkan atas inisiatif MK sendiri. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

---

<sup>4</sup> Damanik, C. (2024). Fungsi PERADI Sebagai Organ Negara dalam Arti Luas untuk Mewujudkan Supremasi Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5490-5502.

Konstitusi, setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, berhak mengajukan permohonan uji materi kepada MK. Dengan adanya hak ini, individu atau kelompok masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal ketertiban hukum dan memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Proses uji materi ini bukan hanya sekedar mencari keadilan bagi pihak yang mengajukan permohonan, tetapi juga berfungsi lebih luas sebagai sarana untuk memastikan bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif tidak mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Ketika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional dan harus dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa MK berperan sebagai penjaga utama dari supremasi hukum di Indonesia, dengan menjamin bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat tidak melanggar norma-norma konstitusional yang telah disepakati.

Secara eksplisit, dasar hukum yang memberikan wewenang kepada MK untuk melakukan uji materi adalah Pasal 24C UUD 1945, yang menyebutkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur lebih rinci tentang prosedur dan mekanisme uji materi, termasuk siapa saja yang berhak mengajukan permohonan uji materi, prosedur persidangan, serta tata cara pengambilan keputusan oleh MK. Lebih lanjut, dalam Pasal 7A UUD 1945, MK juga diberi kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang artinya keputusan MK tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lainnya, baik oleh DPR, Presiden, ataupun lembaga negara lainnya. Hal ini menegaskan posisi MK sebagai lembaga yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Dalam proses uji materi, MK akan mendalami dan menilai apakah norma-norma yang ada dalam undang-undang yang diuji bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.<sup>5</sup>

Sebagai lembaga yang independen, MK berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Melalui uji materi, MK mampu menguji apakah undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, serta memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak mengancam hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini merupakan bagian dari prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan agar tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan yang lebih besar atau tidak terkendali. Dengan demikian, MK berperan sebagai penyeimbang yang menjaga agar semua tindakan negara tetap berada dalam koridor konstitusional. Selain itu, MK juga berperan dalam menjaga hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya yang dijamin dalam UUD 1945. Jika suatu undang-undang dianggap melanggar hak-hak tersebut, MK dapat membatalkan atau mengubah undang-undang tersebut agar sesuai dengan UUD 1945. Melalui peran ini, MK tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap produk legislatif, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Beberapa keputusan MK yang signifikan dalam uji materi telah memberikan dampak besar terhadap tatanan hukum Indonesia. Contohnya adalah keputusan MK yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan, yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Selain itu, MK juga pernah menguji Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang berkaitan dengan pembatasan kewenangan dalam pembentukan partai politik. Keputusan-keputusan tersebut

---

<sup>5</sup> Surya, F. A., Wardhani, L. C., Christia, A. M., & Tristy, M. T. (2024). Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1393-1402.

memperlihatkan bagaimana MK bertindak tegas dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Keputusan-keputusan MK ini memperlihatkan bahwa meskipun suatu undang-undang telah melalui proses legislasi yang panjang, tidak berarti undang-undang tersebut sudah pasti sesuai dengan UUD 1945. Dalam hal ini, MK sebagai lembaga pengadilan konstitusi memiliki peran untuk mengoreksi atau bahkan membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, MK tidak hanya menjadi pelaksana tugas yang pasif, tetapi juga aktif dalam menjaga supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia melalui pelaksanaan uji materi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai lembaga independen, MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi dan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Peran ini tidak hanya penting dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Oleh karena itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

### **Tantangan Yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Kedaulatan Negara Melalui Putusan-Putusan Yang Bersifat Mengikat Dan Berpengaruh Besar Terhadap Kebijakan Pemerintah**

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memainkan peran yang sangat vital dalam menegakkan kedaulatan negara melalui putusan-putusan yang bersifat mengikat dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai lembaga yang bertugas mengawal konstitusi, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil pemilu, serta memberikan putusan mengenai pembubaran partai politik dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tugas MK tersebut memiliki konsekuensi besar, karena putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam perkara, tetapi juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan undang-undang yang berlaku secara keseluruhan. Dasar hukum dari peran MK ini tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang, memutus sengketa pemilu, serta memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan MK ini memberikan MK posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga memberikan dasar hukum lebih lanjut mengenai kewenangan dan prosedur yang berlaku bagi MK dalam menjalankan tugasnya. Namun, meskipun memiliki kekuasaan yang besar, MK juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam menghadapi keputusan-keputusan yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah dan kedaulatan negara.<sup>6</sup>

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh MK dalam menegakkan kedaulatan negara adalah bagaimana memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan benar-benar dipatuhi dan diterima oleh semua pihak, termasuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Putusan MK yang bersifat mengikat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, tidak hanya memiliki dampak terhadap pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga terhadap kebijakan publik dan implementasi hukum di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, jika MK mengeluarkan putusan yang membatalkan sebuah pasal dalam undang-undang, maka seluruh

---

<sup>6</sup> Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia*, 9(2), 815-824.

aparatus negara harus menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Namun, meskipun MK memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang mengikat, dalam praktiknya, penerapan putusan MK terkadang menemui hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh MK adalah kurangnya kepatuhan atau resistensi dari pihak-pihak tertentu, baik itu lembaga negara atau kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut. Contoh yang paling sering muncul adalah ketika pemerintah atau legislatif enggan atau terlambat untuk melaksanakan putusan MK, baik dalam konteks perubahan kebijakan maupun dalam hal pembatalan undang-undang yang telah diuji. Hal ini seringkali menimbulkan ketegangan antara lembaga negara, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas peran MK sebagai penjaga konstitusi. Tantangan ini diperburuk dengan adanya sikap dari beberapa pihak yang melihat MK lebih sebagai lembaga yang terlalu mengintervensi kebijakan pemerintah, daripada sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap dalam kerangka yang sesuai dengan UUD 1945. Pihak yang dirugikan dari keputusan MK seringkali menilai bahwa putusan MK tersebut tidak sejalan dengan kepentingan politik atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, MK harus menghadapi tantangan besar untuk menegakkan kedaulatan negara dengan mengatasi berbagai upaya penolakan atau penundaan pelaksanaan putusan yang dapat merusak otoritas dan kewibawaan MK sebagai lembaga negara.

Putusan MK seringkali memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, MK memiliki kewenangan untuk menguji kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi. Dalam hal ini, MK dapat memutuskan bahwa suatu kebijakan atau peraturan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kebijakan tersebut harus dibatalkan atau diperbaiki. Sebuah keputusan MK yang membatalkan kebijakan pemerintah tentunya dapat menimbulkan ketegangan antara lembaga eksekutif dan MK, terutama jika kebijakan tersebut sudah dilaksanakan atau sudah menjadi bagian dari program pemerintahan yang lebih besar. Sebagai contoh, pada tahun 2019, MK membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun keputusan tersebut memperbaiki sistem pemilu, pelaksanaannya membutuhkan waktu dan usaha besar untuk melakukan perubahan dalam mekanisme pemilu yang sudah ada. Perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh putusan MK tersebut tentu saja mempengaruhi dinamika politik dan administratif negara, serta memerlukan penyesuaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun partai politik. Tantangan lain terkait dengan pengaruh putusan MK terhadap kebijakan pemerintah adalah ketika putusan MK mengarah pada pembatasan kekuasaan eksekutif atau legislatif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan politik, terutama jika keputusan MK dianggap mengurangi kewenangan atau kendali yang dimiliki oleh pemerintah atau DPR. Dalam situasi seperti ini, MK harus mampu menjaga netralitas dan objektivitasnya dalam mengambil keputusan, serta menghindari intervensi politik yang dapat merusak independensi lembaga tersebut.

Sebagai lembaga negara yang independen, MK harus mampu menjaga kredibilitas dan integritasnya dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengaruh politik dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, MK harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional dan bukan pada kepentingan politik sesaat. Tantangan ini semakin besar mengingat MK sering kali harus memutuskan perkara yang melibatkan isu-isu kontroversial dan sensitif, seperti sengketa hasil pemilu atau pembubaran partai politik, yang bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan pemerintahan. Keberhasilan MK dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada independensinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, MK harus terus memperkuat mekanisme internal yang menjamin bahwa setiap putusan diambil dengan

pertimbangan yang objektif dan bebas dari tekanan eksternal. MK juga perlu memastikan bahwa proses pemilihan hakim konstitusi dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap integritas lembaga ini. Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kedaulatan negara melalui putusan-putusan yang bersifat mengikat dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah sangat besar. MK harus mampu memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk oleh pemerintah dan legislatif. Selain itu, MK juga harus menghadapi tantangan untuk menjaga independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional, mengingat dampak besar dari putusan yang diambil terhadap kebijakan publik. Meskipun demikian, MK tetap berperan sebagai lembaga yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan kedaulatan negara, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan UUD 1945.<sup>7</sup>

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan kedaulatan negara melalui putusan yang mengikat dan berdampak besar terhadap kebijakan pemerintah adalah bahwa MK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusionalitas di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pengawas dan pengoreksi terhadap produk legislasi yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Meskipun MK memiliki kekuasaan yang besar, ia juga dihadapkan pada tantangan besar terkait dengan pelaksanaan putusan yang mengikat, yang terkadang menemui resistensi atau penundaan dari pihak eksekutif dan legislatif, serta dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Selain itu, MK juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga independensinya dalam menghadapi tekanan politik dan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil benar-benar berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional dan bukan pada kepentingan politik sesaat. Dengan demikian, MK memiliki peran yang tak tergantikan dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan produk legislasi selalu berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan UUD 1945, meskipun harus menghadapi tantangan besar dalam menjalankan kewenangannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.
- Damanik, C. (2024). Fungsi PERADI Sebagai Organ Negara dalam Arti Luas untuk Mewujudkan Supremasi Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5490-5502.
- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*, 1-20.
- Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 312-320.

---

<sup>7</sup> Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*, 1-20.

- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia*, 9(2), 815- 824.
- Salia, E. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Doctrinal*, 1(1), 1-18.
- Surya, F. A., Wardhani, L. C., Christia, A. M., & Tristy, M. T. (2024). Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1393-1402.